Journal of Indonesian Scholars for Social Research
2025, Vol. 5, No. 1 *(Special Issue)*, 143-159

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo: Implikasi Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

[1]Dikson Junus, [2]Suaib Napir, [3]Dian Puspaningrum, [4]Ernikawati, [5]Herman Hatta
Universitas Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo serta implikasinya terhadap tata kelola dan reformasi birokrasi. Pengelolaan sampah yang efektif merupakan tantangan besar bagi kota-kota berkembang, termasuk Kota Gorontalo, mengingat volume sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah, seperti melalui program 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* dan penyuluhan lingkungan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal ketimpangan partisipasi masyarakat, koordinasi antar instansi pemerintah yang belum optimal, serta proses birokrasi yang lambat. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan, meskipun menunjukkan kemajuan, masih memerlukan percepatan implementasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan responsif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, dan percepatan reformasi birokrasi sebagai langkah strategis untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Gorontalo. Temuan ini relevan sebagai referensi bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan.

Kata Kunci: kolaborasi, pengelolaan sampah, tata kelola, reformasi birokrasi, Kota Gorontalo

1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu tantangan global yang semakin mendesak dalam beberapa dekade terakhir. Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan populasi dunia, volume sampah perkotaan diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025 (World Bank, 2020). Kota-kota berkembang di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi beban yang lebih besar karena infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah (UNEP, 2019). Kota Gorontalo, sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan ini. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat, sementara sistem pengelolaannya belum sepenuhnya optimal.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah serius, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman kesehatan masyarakat (Tchobanoglous et al., 1993). Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan dan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, sedangkan masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam memulai perilaku pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sejak dari sumbernya (Ostrom, 1990). Namun, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang tepat, lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta keterbatasan sumber daya yang memadai.

Reformasi birokrasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi tersebut. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan tercipta sistem yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Osborne & Gaebler, 1992). Namun, proses birokrasi yang lambat dan tumpang tindih masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

Kota Gorontalo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat ditingkatkan, serta bagaimana implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi dapat memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Pratama dan Rahardjo (2020) menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Surabaya berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Demikian pula, Wahyudi (2020) menemukan bahwa reformasi birokrasi dalam pengelolaan sampah di Makassar dapat mempercepat respon terhadap masalah pengelolaan sampah melalui digitalisasi pelayanan. Namun, literatur tersebut cenderung fokus pada kota-kota besar seperti Surabaya dan Makassar, sementara studi serupa di kota kecil seperti Gorontalo masih sangat terbatas.

Selain itu, sedikit penelitian yang secara eksplisit mengeksplorasi hubungan antara tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Kesenjangan ini menjadi dasar pembenaran untuk penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang model kolaborasi yang dapat diterapkan di kota-kota berkembang. Penelitian ini juga berkontribusi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini memiliki empat tujuan utama:

1. Menganalisis kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Menilai implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.
4. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada literatur tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi. Penelitian ini juga melengkapi teori Agranoff dan McGuire (2001) tentang kolaborasi dalam tata kelola publik, serta teori Ostrom (1990) tentang pengelolaan sumber daya bersama.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, serta bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan.

1.1 Teori Kolaborasi

Teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Agranoff dan McGuire (2001) menjelaskan bahwa kolaborasi adalah proses interaksi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengelolaan sampah, teori ini relevan karena menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program pengelolaan sampah. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui distribusi tanggung jawab yang lebih adil dan partisipatif.

1.2 Teori Pengelolaan Sumber Daya Bersama

Elinor Ostrom (1990) mengembangkan teori pengelolaan sumber daya bersama yang menekankan pentingnya komitmen kolektif dari semua pihak dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan sampah, teori ini relevan karena menunjukkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Teori ini juga mendukung argumen bahwa kebijakan pemerintah harus memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1.3 Teori Tata Kelola

Menurut Kooiman (2003), tata kelola adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

aktor dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, teori ini relevan karena menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 Reformasi Birokrasi

Osborne dan Gaebler (1992) mengemukakan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks pengelolaan sampah, reformasi birokrasi dapat membantu memperbaiki koordinasi antar instansi pemerintah, menyederhanakan prosedur administratif, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana reformasi birokrasi dapat

1.5 Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Pratama dan Rahardjo (2020) meneliti kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Demikian pula, Sanjaya (2017) menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat pemerintah kota.

Namun, literatur ini cenderung fokus pada kota-kota besar seperti Surabaya dan Bandung, sementara studi serupa di kota kecil seperti Gorontalo masih sangat terbatas. Selain itu, sedikit penelitian yang secara eksplisit mengeksplorasi hubungan antara tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah.

1.6 Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Sampah

Kurniawan (2018) meneliti reformasi birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur birokrasi dapat meningkatkan efisiensi alur pengelolaan sampah dan kinerja instansi pemerintah. Wahyudi (2020) juga menemukan bahwa digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas pegawai dapat mempercepat respon terhadap masalah pengelolaan sampah di Kota Makassar.

Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa proses birokrasi yang lambat dan tumpang tindih masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di banyak daerah.

1.7 Tata Kelola Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Damanik (2019) menekankan pentingnya tata kelola yang berbasis pada prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Mulyani (2021) menambahkan bahwa penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan sangat penting untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Namun, literatur ini jarang membahas secara spesifik bagaimana tata kelola dan reformasi birokrasi dapat diterapkan dalam konteks kota kecil seperti Gorontalo. Hal ini menjadi kesenjangan penelitian yang ingin dijawab oleh penelitian ini.

1.8 Integrasi Teori dan Kajian Terdahulu

Teori kolaborasi, pengelolaan sumber daya bersama, tata kelola, dan reformasi birokrasi saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Teori kolaborasi dan pengelolaan sumber daya bersama menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sementara teori tata kelola dan reformasi birokrasi memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana pemerintah dapat memfasilitasi kolaborasi tersebut melalui kebijakan dan reformasi struktural.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat telah memberikan dampak positif, tantangan seperti ketimpangan partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar instansi, dan proses birokrasi yang lambat masih perlu diatasi. Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan kolaborasi dalam pengelolaan sampah, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dan reformasi birokrasi di Kota Gorontalo.

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

1.9 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori dan kajian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara kolaborasi pemerintah dan masyarakat, tata kelola, serta reformasi birokrasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Diagram berikut menggambarkan kerangka konseptual secara visual:

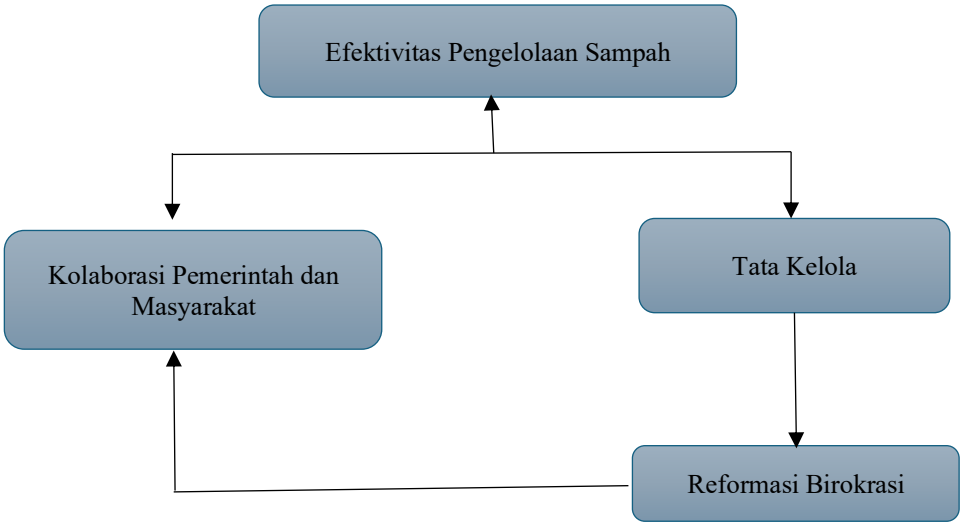

Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual

Kolaborasi ini mengacu pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan sampah yang efektif. Program 3R *(Reduce, Reuse, Recycle)* meliputi penyuluhan lingkungan, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas terkait pengelolaan sampah. Dalam pendekatan peran dalam sistem, kolaborasi menjadi elemen utama yang memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan.

Tata kelola adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Koordinasi antar instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pengelolaan sampah. Tata kelola yang baik memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil melalui penyederhanaan prosedur administratif dan digitalisasi layanan. Penyederhanaan proses perizinan untuk sektor pengelolaan sampah, penerapan teknologi digital dalam pemantauan sampah, dan peningkatan kapasitas pegawai pemerintah. Reformasi birokrasi mendukung kolaborasi dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Efektivitas pengelolaan sampah adalah hasil akhir dari interaksi antara kolaborasi, tata kelola, dan reformasi birokrasi. Ini mencakup pengurangan volume sampah, peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi infrastruktur pengelolaan sampah, dan pencapaian pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Indikator Keberhasilan :

1. Volume sampah yang berkurang.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.
4. Pencapaian target pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
5. Hubungan Antar Elemen

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

6. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dipengaruhi oleh Tata Kelola yang baik dan Reformasi Birokrasi yang efektif.

Tata kelola yang transparan dan akuntabel memfasilitasi kolaborasi dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga, reformasi birokrasi yang responsif dan efisien mendukung kolaborasi dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kinerja pemerintah. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi saling mendukung satu sama lain. Tata kelola yang baik memastikan bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Reformasi birokrasi yang efektif meningkatkan kualitas tata kelola dengan menciptakan sistem yang lebih responsif dan efisien.

Berdasarkan gambar dan penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, tata kelola yang baik, dan reformasi birokrasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Gorontalo. Ketiga elemen ini saling terkait dan saling memperkuat untuk mencapai efektivitas pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan

Integrasi teori dan kajian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, tata kelola yang baik, serta reformasi birokrasi merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menjadi dasar yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Penelitian ini akan mengidentifikasi serta menjelaskan tantangan dan peluang yang ada, serta menganalisis implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang terjadi di lapangan.

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih kaya, seperti motivasi, pengalaman, dan persepsi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks lokal, khususnya terkait dengan tata kelola dan reformasi birokrasi.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian, beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

Wawancara Mendalam *(In-depth Interview)*: Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah Kota Gorontalo yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah, masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah, serta pihak-pihak lain yang terkait seperti pengusaha atau LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi, pengalaman, tantangan, dan harapan mereka terkait dengan pengelolaan sampah dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan, serta untuk memantau implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah yang ada. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kontekstual dan mendalam tentang dinamika yang terjadi.

Dokumentasi: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang relevan, seperti kebijakan pemerintah daerah, laporan tahunan, peraturan daerah (perda) terkait

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

pengelolaan sampah, serta data yang terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Dokumentasi ini akan memberikan pemahaman mengenai kebijakan yang telah diterapkan serta keberhasilan atau tantangan dalam implementasinya.

2.4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
Reduksi Data: Proses ini mencakup pemilahan dan penyaringan data yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti akan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, tata kelola, dan reformasi birokrasi dalam pengelolaan sampah. Data yang tidak relevan akan dikeluarkan agar analisis lebih fokus.
Penyajian Data: Data yang sudah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi atau tabel, yang mempermudah pemahaman dan interpretasi. Penyajian data akan dilakukan berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penarikan Kesimpulan: Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan akan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, serta implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi terhadap efektivitas pengelolaan sampah.
Triangulasi Data: Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis, teknik triangulasi data akan digunakan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mencari kesesuaian dan konsistensi antar sumber data. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

2.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
Sumber primer: Wawancara dengan pejabat pemerintah Kota Gorontalo yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Sumber sekunder: Dokumen-dokumen kebijakan pengelolaan sampah, laporan tahunan, dan literatur yang relevan terkait tata kelola dan reformasi birokrasi di Kota Gorontalo.

2.6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dan *member checking*, yaitu: 1) Triangulasi: Membandingkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi; 2) *Member Checking*: Melibatkan responden untuk memverifikasi temuan sementara yang diperoleh melalui wawancara atau observasi, guna memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, serta implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi. Pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi akan menghasilkan temuan yang lebih valid dan relevan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif**.**

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah Kota Gorontalo dan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program, seperti pengumpulan sampah terpisah *(3R: Reduce, Reuse, Recycle)* dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Masyarakat juga berperan aktif dalam program ini, terutama melalui pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan penyuluhan lingkungan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat.
Namun, meskipun ada kolaborasi, terdapat ketimpangan dalam hal partisipasi. Beberapa masyarakat di daerah tertentu belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan sampah, baik karena kurangnya

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

pemahaman maupun keterbatasan fasilitas pendukung. Hal ini menjadi tantangan utama dalam mencapai efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Gorontalo. Untuk mengatasi permasalahan ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci penting. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo, terdapat sejumlah catatan terkait bentuk kerja sama yang telah dilakukan, regulasi yang mendukung, serta program-program pengelolaan sampah yang sedang berjalan.

Kerja sama antara pemerintah dan *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo saat ini masih bersifat insidental dan belum ter programkan secara sistematis. Beberapa contoh kerja sama yang telah dilakukan meliputi:

1. Kemitraan dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG): Saat ini, DLH Kota Gorontalo bekerja sama dengan UNG dalam penelitian tentang Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kota Gorontalo Dalam Upaya Transformasi Kota Menuju Kelestarian Lingkungan Yang Ramah Dan Bersih. Penelitian ini didanai melalui skema Riset Inovasi (RISNOV) LPDP tahun 2024. Meskipun kerja sama ini menjanjikan, belum ada MoU atau PKS yang mengikat antara kedua belah pihak.
2. Program CSR dari Bank SULUTGO: Bank SULUTGO memberikan bantuan berupa mobil operasional pengangkut sampah. Bantuan ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah di Kota Gorontalo.
3. Bantuan dari PT Karsa Utama dan Ikatan Alumni Sekolah: Kedua pihak ini memberikan bantuan kesejahteraan kepada petugas kebersihan dan pengangkut sampah dalam bentuk paket sembako. PT Karsa Utama memberikan bantuan setiap bulan Ramadan, sementara Ikatan Alumni Sekolah juga turut berkontribusi dalam bentuk serupa. Namun, bantuan ini bersifat insidental dan tidak terjadwal secara rutin.

Meskipun ada beberapa kerja sama yang telah dilakukan, belum ada bentuk kerja sama yang terpadu dan ter programkan antar *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

3.1.2 Tata Kelola Pengelolaan Sampah

Tata kelola pengelolaan sampah di Kota Gorontalo masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal transparansi, koordinasi antar instansi, dan pengawasan. Beberapa program pengelolaan sampah terkendala oleh hambatan struktural dalam birokrasi yang lambat, yang menyulitkan implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), instansi terkait, dan pihak swasta belum optimal, yang menyebabkan kebijakan yang ada tidak sepenuhnya terintegrasi.

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo telah meluncurkan sejumlah program inovatif untuk mengatasi permasalahan sampah. Program unggulan yang dijalankan adalah:

1. Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam mengelola sampah dengan prinsip 3R, yaitu mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse), dan mendaur ulang (recycle).
   Saat ini, terdapat 10 titik TPS3R yang tersebar di berbagai wilayah Kota Gorontalo. Pengelolaan TPS3R ini dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Lurah setempat. Keterlibatan KSM ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, meskipun program ini menjanjikan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan.
   Pertama, kurangnya dukungan dana menjadi salah satu kendala utama. Banyak TPS3R yang bergantung pada anggaran pemerintah, namun alokasi dana yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan beberapa TPS3R kesulitan untuk menjalankan fungsinya secara optimal.
   Kedua, biaya operasional yang tinggi juga menjadi beban tambahan bagi pengelola TPS3R. Salah satu contohnya adalah biaya pengiriman sampah plastik ke kota tujuan seperti Surabaya. Biaya logistik yang besar ini membuat pengelolaan sampah plastik menjadi kurang efisien dan sulit

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

dikelola secara mandiri oleh KSM.

Ketiga, harga sampah plastik yang rendah turut memperburuk kondisi TPS3R. Saat ini, harga jual sampah plastik di pasaran tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk mengumpulkan, memilah, dan mengirimkannya. Akibatnya, pendapatan dari penjualan sampah plastik belum mampu menutupi biaya operasional TPS3R, sehingga program ini sulit berjalan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah.

Keempat, konflik internal di dalam KSM menjadi tantangan lain yang memengaruhi stabilitas operasional TPS3R. Konflik ini sering kali berkaitan dengan distribusi tanggung jawab, pengelolaan keuangan, atau ketidaksesuaian visi antaranggota KSM. Situasi ini tidak hanya menghambat kinerja TPS3R, tetapi juga berpotensi melemahkan semangat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Meskipun demikian, DLH Kota Gorontalo tetap optimistis bahwa program TPS3R dapat menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah berencana untuk meningkatkan dukungan anggaran, mendorong partisipasi swasta melalui program CSR, serta memberikan pelatihan kepada KSM untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan mengurangi konflik internal.

Program TPS3R ini merupakan langkah awal yang penting dalam transformasi Kota Gorontalo menuju kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, diharapkan TPS3R dapat menjadi model pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lainnya.

Namun, perjalanan menuju keberhasilan ini masih memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, dukungan regulasi yang lebih kuat, serta inovasi dalam pengelolaan limbah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kota Gorontalo berpeluang besar untuk menjadi contoh kota yang berhasil mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan.

2. Rumah Kompos di Kawasan Eks TPA Kelurahan Pohe:

   Program inovatif ini mengolah pemisahan sampah organik dan non-organik. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos, sementara residu (sampah yang tidak bermanfaat) dikirim ke TPA Talumelito. Namun, biaya pengiriman residu ke TPA cukup tinggi, sehingga menjadi beban tambahan bagi DLH. Program ini merupakan upaya nyata untuk mengelola sampah secara lebih efisien dan ramah lingkungan melalui pemilahan antara sampah organik dan non-organik. Dalam operasionalnya, sampah organik yang terkumpul diolah menjadi pupuk kompos, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian atau perkebunan lokal. Sementara itu, residu yaitu sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis atau tidak dapat diolah lebih lanjut dikirim ke TPA Talumelito untuk ditangani lebih lanjut. Meskipun program ini menunjukkan potensi besar dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah biaya pengiriman residu ke TPA Talumelito, yang cukup tinggi. Biaya logistik ini menjadi beban tambahan bagi DLH, mengingat anggaran yang tersedia untuk pengelolaan sampah masih terbatas. Hal ini membuat program Rumah Kompos sulit berjalan secara mandiri tanpa dukungan pendanaan yang memadai.

   Pogram ini juga memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumbernya. Saat ini, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memilah sampah organik dan non-organik. Akibatnya, proses pemilahan di Rumah Kompos menjadi lebih rumit dan memakan waktu, karena petugas harus melakukan pemilahan ulang terhadap sampah yang datang. Namun demikian, program Rumah Kompos tetap memberikan dampak positif yang signifikan. Selain menghasilkan pupuk kompos yang bermanfaat bagi lingkungan, program ini juga membantu mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke TPA Talumelito. Keberadaan Rumah Kompos juga menjadi contoh konkret bagaimana pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah organik.

   DLH Kota Gorontalo dalam mengoptimalkan program ini, berencana untuk meningkatkan

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya. Selain itu, pemerintah juga sedang menjajaki peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung biaya operasional, termasuk pengiriman residu ke TPA. Dengan dukungan yang lebih baik dari semua pihak, Rumah Kompos diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Program Rumah Kompos ini membuktikan bahwa inovasi dalam pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Dengan komitmen bersama, Rumah Kompos dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Gorontalo, sekaligus mendukung visi kota menuju lingkungan yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses pengangkutan sampah sering terlambat dan tidak dilakukan setiap hari karena kurangnya armada pengangkut dan distribusi tugas yang tidak merata. Keterlambatan pengangkutan sampah disebabkan oleh kurangnya armada pengangkut yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Armada yang tersedia saat ini tidak mampu menjangkau seluruh wilayah secara efektif, terutama di daerah padat penduduk atau permukiman yang lokasinya sulit diakses. Akibatnya, banyak tempat penampungan sementara (TPS) menjadi penuh sesak, sehingga sampah meluber ke jalan-jalan dan area sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya menciptakan pemandangan yang tidak sedap dipandang, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, distribusi tugas yang tidak merata juga menjadi kendala dalam proses pengangkutan sampah. Beberapa petugas kebersihan mengeluhkan bahwa beban kerja mereka tidak seimbang, dengan beberapa wilayah mendapatkan prioritas lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam layanan pengangkutan sampah, di mana beberapa area terlayani dengan baik, sementara area lainnya terabaikan hingga waktu yang lama.

Keterbatasan armada dan distribusi tugas yang tidak merata ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara DLH dan pihak-pihak terkait, seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertugas mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Dibeberapa lokasi, petugas TPS3R harus menunggu berhari-hari hingga armada pengangkut datang untuk mengambil sampah yang sudah dipilah. Selama periode penantian tersebut, tumpukan sampah semakin menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap serta potensi pencemaran lingkungan.

Kondisi ini juga memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kebersihan. Banyak warga yang mengeluhkan lambatnya proses pengangkutan sampah, terutama di wilayah-wilayah pinggiran kota yang cenderung kurang mendapat perhatian. Ketidakpastian jadwal pengangkutan membuat masyarakat enggan memilah sampah dengan benar, karena mereka merasa upaya mereka tidak akan berdampak signifikan jika sampah tetap menumpuk tanpa diangkut.

Untuk mengatasi tantangan ini, DLH Kota Gorontalo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkutan sampah yang ada. Penambahan armada pengangkut menjadi prioritas utama untuk memastikan semua wilayah dapat terlayani secara merata. Selain itu, redistribusi tugas petugas kebersihan dan optimalisasi rute pengangkutan juga perlu dilakukan agar proses pengangkutan sampah lebih efisien dan tepat waktu.

Dukungan dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat dimanfaatkan untuk menambah jumlah armada atau membantu biaya operasional pengangkutan sampah. Kolaborasi dengan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilaham sampah dari sumbernya, sehingga proses pengangkutan dapat berjalan lebih lancar.

Secara keseluruhan, hasil observasi lapangan ini menunjukkan bahwa pengangkutan sampah masih menjadi salah satu titik lemah dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Namun, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, seperti penambahan armada, redistribusi tugas, dan peningkatan partisipasi masyarakat, diharapkan proses pengangkutan sampah dapat

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

3.1.3 Reformasi Birokrasi dalam Pengelolaan Sampah

Reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Dalam rangka mendukung upaya ini, pemerintah Kota telah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar hukum dan pedoman operasional dalam pengelolaan sampah. Dua peraturan daerah (PERDA) yang menjadi pijakan utama adalah PERDA No. 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan PERDA No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi .

PERDA No. 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan regulasi yang menegaskan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. PERDA ini mengatur prinsip-prinsip pengelolaan sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Selain itu, PERDA ini juga memberikan landasan bagi pemerintah untuk membentuk Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun, implementasi PERDA ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajibannya dalam memilah sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERDA ini. Oleh karena itu, reformasi birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

Di sisi lain, PERDA No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah. PERDA ini mengatur mekanisme pungutan retribusi atas layanan pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk mendukung pendanaan operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjalankan program-program pengelolaan sampah. Retribusi ini dibebankan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan institusi yang menggunakan layanan kebersihan dari pemerintah daerah. Namun, implementasi PERDA ini juga menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana yang terkumpul. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi birokrasi dalam sistem administrasi dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa retribusi yang dipungut benar-benar digunakan untuk mendukung program pengelolaan sampah.

Reformasi birokrasi dalam konteks kedua PERDA ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penyederhanaan prosedur administrasi untuk mempermudah masyarakat dalam mematuhi regulasi, seperti pembayaran retribusi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah. Ketiga, penguatan kolaborasi antarstakeholder , termasuk pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi, untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain itu, reformasi birokrasi juga harus didukung oleh inovasi teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Misalnya, pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan sampah dapat membantu pemerintah dalam memantau kinerja program, mengidentifikasi masalah, dan merancang solusi yang lebih tepat sasaran. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang saat ini sedang melakukan penelitian tentang sistem informasi manajemen pengelolaan sampah, dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan inovasi ini.

Secara keseluruhan, reformasi birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo harus dimulai dari penguatan regulasi yang sudah ada, seperti PERDA No. 12 Tahun 2017 dan PERDA No. 1 Tahun 2024. Dengan implementasi yang lebih baik, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan dari semua pihak, kedua PERDA ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong transformasi Kota Gorontalo menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Reformasi ini tidak akan berhasil tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui sinergi yang solid, Kota Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadi contoh kota yang berhasil mengelola sampah secara modern, transparan, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan.

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

3.1.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan upaya pengurangan volume sampah. Keterlibatan masyarakat di tingkat rumah tangga dan komunitas memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas program-program pengelolaan sampah yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Namun, temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah masih rendah, terutama di daerah pinggiran kota. Beberapa wilayah yang menjadi lokasi penelitian, masyarakat yang secara aktif terlibat dalam pemilahan sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Misalnya, rumah tangga yang mempraktikkan prinsip 3R tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga berkontribusi pada pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti pupuk kompos dari sampah organik atau kerajinan dari bahan daur ulang. Selain itu, partisipasi aktif komunitas dalam mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) juga membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Namun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah masih belum merata. Di daerah pinggiran kota, misalnya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep 3R atau bahkan tidak mengetahui cara memilah sampah dengan benar. Ketidaktahuan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah serta minimnya akses informasi tentang program pengelolaan sampah. Akibatnya, sampah di daerah-daerah tersebut sering kali dibuang secara sembarangan tanpa melalui proses pemilahan, sehingga memperburuk permasalahan lingkungan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga dipengaruhi oleh kurangnya insentif atau motivasi ekonomi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata, sehingga mereka cenderung abai terhadap kewajiban mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah, terutama dalam konteks keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam upaya pengelolaan sampah. Edukasi massal melalui kampanye lingkungan, pelatihan praktis tentang pemilahan sampah, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pemberian insentif, seperti subsidi atau penghargaan bagi kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah, juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong partisipasi.

Penting untuk dicatat bahwa peran aktif masyarakat bukan hanya sekadar dukungan tambahan, tetapi merupakan elemen inti dalam keberhasilan program pengelolaan sampah. Tanpa partisipasi yang luas dan berkelanjutan dari masyarakat, program-program seperti TPS3R, Rumah Kompos, dan pengelolaan residu akan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya mutlak diperlukan untuk menciptakan budaya kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil temuan ini menegaskan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam pengelolaan sampah. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama di daerah pinggiran kota, Kota Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengatasi permasalahan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kolaboratif dan penguatan edukasi, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi lingkungan menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan.

3.2 Pembahasan

Temuan penelitian ini mendukung teori Agranoff dan McGuire (2001) tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun kolaborasi telah berjalan, tantangan seperti kurangnya pemahaman dan partisipasi dari sebagian masyarakat dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan.

Temuan penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori yang dikemukakan oleh Agranoff dan

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

McGuire (2001) tentang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, kolaborasi antara pemerintah kota dan masyarakat telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tercermin dalam berbagai program pengelolaan sampah, seperti pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan operasional Rumah Kompos di eks TPA Kelurahan Pohe. Program-program ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai fasilitator, tetapi juga mengandalkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan partisipasi dari sebagian masyarakat dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Di beberapa wilayah, terutama di daerah pinggiran kota, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) atau bahkan enggan memilah sampah di tingkat rumah tangga. Ketidaktahuan ini sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara merata. Akibatnya, program-program kolaboratif yang telah dirancang dengan baik sulit mencapai hasil optimal karena kurangnya dukungan dari masyarakat.

Selain itu, tantangan internal dalam kolaborasi juga turut memengaruhi keberhasilan program. Misalnya, konflik internal di dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPS3R menyebabkan ketidakstabilan operasional program. Sementara itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah membuat beban kerja KSM semakin berat, sehingga program menjadi kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya membutuhkan komitmen bersama, tetapi juga keterlibatan yang aktif, konsisten, dan berkelanjutan dari semua pihak.

Teori Agranoff dan McGuire (2001) menekankan bahwa kolaborasi yang sukses memerlukan koordinasi yang baik, distribusi tanggung jawab yang jelas, serta komunikasi yang efektif antara para pihak. Dalam konteks Kota Gorontalo, pemerintah perlu memperkuat mekanisme kolaborasi dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat, memberikan insentif bagi partisipasi aktif, serta memastikan bahwa semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan manfaat program pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi dialog antara masyarakat, swasta, dan lembaga lainnya untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan sinergi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Meskipun tantangan seperti rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat masih ada, upaya untuk memperkuat kolaborasi melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas dapat membuka peluang besar bagi keberhasilan program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Dengan komitmen bersama, kolaborasi ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Teori Kooiman (2003) tentang tata kelola yang berbasis pada partisipasi dan transparansi juga relevan dengan temuan ini. Tata kelola yang baik dalam pengelolaan sampah seharusnya melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat, dan didasarkan pada prinsip transparansi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah dan masyarakat belum optimal, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori tata kelola yang dikemukakan oleh Kooiman (2003) sangat relevan dengan dinamika pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Menurut Kooiman, tata kelola yang baik harus melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta didasarkan pada prinsip partisipasi dan transparansi. Dalam konteks pengelolaan sampah, keterlibatan aktif masyarakat dan kejelasan informasi menjadi elemen penting untuk memastikan efektivitas program. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah Kota Gorontalo dan masyarakat masih belum optimal, sehingga memengaruhi kinerja pengelolaan sampah secara keseluruhan.

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

Teori Kooiman menekankan bahwa partisipasi masyarakat adalah inti dari tata kelola yang baik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program. Di Kota Gorontalo, partisipasi masyarakat telah terlihat dalam beberapa program, seperti pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan operasional Rumah Kompos di eks TPA Kelurahan Pohe. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi, terutama di daerah pinggiran kota, dimana kesadaran tentang pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah masih rendah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi menyebabkan banyak masyarakat merasa bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga kontribusi mereka cenderung minim atau bahkan tidak ada.

Selain itu, prinsip transparansi dalam tata kelola juga belum sepenuhnya terwujud. Informasi terkait mekanisme pengelolaan sampah, distribusi anggaran, hingga hasil dari program-program yang telah dilaksanakan sering kali tidak tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau skeptisisme dari masyarakat terhadap program pemerintah. Misalnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana retribusi sampah yang mereka bayarkan digunakan, atau bagaimana proses pengangkutan dan pengolahan sampah dilakukan. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi kurang maksimal karena mereka merasa tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang transparan.

Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat juga masih menghadapi tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sinergi antaraktor dalam sistem tata kelola. Pemerintah Kota Gorontalo sering kali bertindak sebagai satu-satunya pengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi program. Hal ini membuat masyarakat merasa kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap program-program pengelolaan sampah. Selain itu, distribusi tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat juga belum sepenuhnya jelas, sehingga sering terjadi tumpang tindih atau bahkan saling lepas tanggung jawab.

Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan sampah, pemerintah Kota Gorontalo perlu memperkuat koordinasi lintas aktor dengan pendekatan yang lebih inklusif. Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program. Selain itu, penerapan prinsip transparansi melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat juga penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan dukungan terhadap program pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, teori Kooiman (2003) memberikan kerangka yang relevan untuk memahami tantangan dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Tata kelola yang baik, yang berbasis pada partisipasi dan transparansi, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah. Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kota Gorontalo dapat bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan, sekaligus menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan sampah.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi yang lebih intensif, terutama di daerah pinggiran kota. Edukasi ini dapat mencakup pentingnya pemilahan sampah, penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R), serta manfaat pengelolaan sampah yang baik bagi lingkungan dan kesehatan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan partisipasi mereka dalam program pengelolaan sampah dapat lebih optimal.

Kedua, reformasi birokrasi harus menjadi prioritas untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Fokus utama reformasi ini adalah penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan responsivitas pemerintah dalam menangani keluhan atau tantangan di lapangan. Misalnya, distribusi armada pengangkutan sampah dan jadwal pengangkutan perlu dioptimalkan agar lebih merata dan tepat waktu. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan retribusi juga perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

Ketiga, pemanfaatan teknologi perlu diperluas sebagai alat untuk mendukung efisiensi pengelolaan sampah. Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk memantau volume sampah, jadwal pengangkutan, dan kinerja program TPS3R. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi ini, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar semua pihak dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Secara keseluruhan, ketiga rekomendasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi dengan masyarakat dan pemanfaatan inovasi teknologi. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3.3 Keterkaitan dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

3.3.1 Teori Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan sampah. Program-program seperti Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Rumah Kompos menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah serta mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, temuan ini juga menyoroti bahwa partisipasi aktif masyarakat masih menjadi kendala utama , terutama di daerah pinggiran kota, di mana kesadaran tentang pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah masih rendah.

Kendala ini menunjukkan perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi massal dan kampanye lingkungan yang lebih intensif. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pendukung, seperti tempat pemilahan sampah yang memadai, armada pengangkutan yang lebih merata, serta insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi aktif. Dengan langkah-langkah ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diperkuat, sehingga program pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah bergantung pada sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, dengan dukungan fasilitas dan kesadaran yang memadai sebagai fondasi utamanya.

3.3.2 Teori Tata Kelola

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Meskipun telah ada program inovatif seperti Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Rumah Kompos, hasilnya belum sepenuhnya mencapai target karena kurangnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat masih terbatas, terutama di daerah pinggiran kota, sehingga menghambat keberhasilan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintahan di Kota Gorontalo masih kurang optimal, yang berdampak langsung pada kualitas pengelolaan sampah. Ketidaksinkronan antara dinas terkait, seperti dalam hal distribusi anggaran, pengadaan armada pengangkutan, dan penanganan residu, sering kali menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab atau bahkan kekosongan peran dalam beberapa aspek. Misalnya, lambatnya pengangkutan sampah dan minimnya fasilitas pendukung menjadi masalah yang sulit diatasi tanpa adanya koordinasi yang baik antarlembaga. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi birokrasi untuk memperbaiki mekanisme kerja antarinstansi.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan semua pihak secara terpadu. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi internal antarlembaga dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, masyarakat juga harus didorong untuk berpartisipasi lebih aktif melalui edukasi massal dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan masyarakat, pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efisien dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

3.3.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pratama dan Rahardjo (2020) yang menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung memiliki dampak positif pada pengurangan sampah. Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di tingkat lokal terbukti efektif dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat bukan hanya sekadar pendukung, tetapi merupakan elemen inti dalam keberhasilan program pengelolaan sampah. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian ini, yang juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah secara signifikan.

Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung hasil kajian Wahyudi (2020) yang menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur birokrasi untuk mempercepat implementasi kebijakan. Dalam konteks pengelolaan sampah, prosedur administrasi yang rumit dan kurang responsif sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Misalnya, distribusi anggaran yang lambat atau mekanisme koordinasi yang tidak jelas antarlembaga dapat memperlambat pengadaan armada pengangkutan sampah atau pembangunan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berfokus pada penyederhanaan prosedur menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara cepat dan efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan dari Pratama dan Rahardjo (2020) terkait pentingnya peran masyarakat, tetapi juga mendukung gagasan Wahyudi (2020) tentang perlunya penyederhanaan birokrasi. Kombinasi dari kedua aspek ini kolaborasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dan penyederhanaan prosedur administrasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya wacana dan praktik pengelolaan sampah di tingkat lokal maupun nasional.

3.4 Implikasi Temuan

3.4.1 Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi. Implikasi teoritis yang signifikan dengan menambahkan kontribusi baru dalam literatur tentang kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Temuan ini memperkaya wacana akademik dengan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat prinsip tata kelola yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk praktik kebijakan di lapangan, tetapi juga memberikan landasan teoritis bagi studi lebih lanjut tentang hubungan antara kolaborasi, tata kelola, dan reformasi birokrasi dalam konteks pengelolaan lingkungan.

3.4.2 Implikasi Praktis

Temuan ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk merancang program pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat juga dapat menggunakan temuan ini sebagai referensi untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi yang luas bagi pembuat kebijakan dan masyarakat. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang program pengelolaan sampah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program-program tersebut harus mencakup mekanisme yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, seperti edukasi massal, insentif bagi pelaku pengelolaan sampah, serta penyediaan fasilitas yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menggunakan temuan ini sebagai referensi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah. Dengan memahami pentingnya pemilahan sampah, pengurangan limbah, dan pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat berkontribusi lebih nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

3.5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti fokus geografis yang terbatas pada Kota Gorontalo, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Selain itu, metode kualitatif yang digunakan membatasi kemampuan untuk mengukur dampak kuantitatif dari kolaborasi.

3.5.6 Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah studi dan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) untuk mengukur dampak kolaborasi secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

4. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Gorontalo telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah. Pemerintah telah menginisiasi berbagai program seperti pengumpulan sampah terpisah (3R: Reduce, Reuse, Recycle) dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Namun, partisipasi masyarakat masih belum merata, terutama di daerah pinggiran kota yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

Beberapa tantangan signifikan diidentifikasi dalam penelitian ini, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, dan proses birokrasi yang lambat. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti armada pengangkutan sampah dan infrastruktur daur ulang juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya perbaikan, seperti penyederhanaan prosedur dan penerapan teknologi digital, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala struktural. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), instansi terkait, dan pihak swasta belum optimal, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah. Reformasi birokrasi yang lebih cepat dan responsif diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, serta percepatan reformasi birokrasi, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Rekomendasi spesifik termasuk peningkatan edukasi masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan sampah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Namun, tantangan seperti ketimpangan partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar instansi, dan proses birokrasi yang lambat perlu diatasi untuk mencapai efektivitas pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

4.1 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang lebih intensif, terutama di daerah pinggiran kota dengan tingkat pendidikan rendah, agar masyarakat lebih memahami pentingnya pengelolaan sampah dan berpartisipasi aktif dalam program seperti 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Kedua, koordinasi antar instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo dan pihak swasta, harus diperkuat untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan efektif. Ketiga, reformasi birokrasi harus dipercepat dengan menyederhanakan prosedur yang tumpang tindih serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pelaporan sampah, sehingga potensi teknologi dapat dioptimalkan. Terakhir, penguatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan terkait manajemen

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Copyright 2025
E-ISSN: 2807-1468

sampah dan tata kelola lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih baik. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, bersih, dan berkelanjutan.

Referensi

Agranoff, R., & McGuire, M. (2001). Big questions in public administration research: The need for collaborations and partnerships in governance. *Public Administration Review, 61*(3), 259–269. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00027

Amin, M., & Sari, R. P. (2021). Community participation in waste management: A case study of Bandung City. *Environmental Management and Sustainable Development, 10*(2), 45–60. https://doi.org/10.5296/emsd.v10i2.18721

Budiman, A., & Hidayat, T. (2020). The role of governance in improving urban waste management systems. *Journal of Environmental Policy & Planning, 22*(4), 512–525. https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1728543

Chen, L., & Wang, Y. (2019). Smart technologies for municipal solid waste management: Opportunities and challenges. *Waste Management, 95*, 381–392. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2019.06.024

Dewi, N. K., & Prasetyo, E. (2022). Collaborative governance in waste management: Lessons from Surabaya, Indonesia. *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, 25*(1), 1–18. https://doi.org/10.1108/PAP-01-2022-0002

Dikson Junus, Nur Istiyan Harun, & Suaib Napir. (2024). Adopting sustainable environmental policy based on quadruple helix model in Gorontalo city, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14*(3). https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.12764

Firdaus, M., & Putra, A. D. (2018). The impact of public-private partnerships on waste management efficiency in developing cities. *Urban Studies Research, 2018*, 1–12. https://doi.org/10.1155/2018/7238451

Hakim, L., & Rahmawati, D. (2021). Barriers to effective waste management in small cities: Evidence from Indonesia. *Sustainability, 13*(15), 8456. https://doi.org/10.3390/su13158456

Kooiman, J. (2003). Governance and governance networks in the public sector. *Public Management Review, 5*(3), 279–291. https://doi.org/10.1080/1471903032000121033

Kurniawan, T. A., & Lo, W. H. (2019). Decentralized waste management systems: A review of practices in Southeast Asia. *Resources, Conservation and Recycling, 142*, 234–245. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.11.023

Mulyani, S., & Santoso, B. (2020). Enhancing community engagement in sustainable waste management: Case studies from Sleman Regency. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(8), 2891. https://doi.org/10.3390/ijerph17082891

Nugroho, A., & Wibowo, S. (2023). Digital transformation in waste management: Challenges and opportunities in Indonesian cities. *Journal of Cleaner Production, 389*, 135821. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135821

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.

Pratama, A. Y., & Rahardjo, B. (2020). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat: Studi kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 6*(1), 45–60. https://doi.org/10.1234/jian.v6i1.1234

Santoso, R., & Hartono, D. (2017). Public awareness and participation in waste separation at source: A study in Yogyakarta City. *Waste Management & Research, 35*(9), 985–993. https://doi.org/10.1177/0734242X17718667

Wahyudi, S. (2020). Reformasi birokrasi dalam pengelolaan sampah: Studi di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, 15*(2), 125–140. https://doi.org/10.5678/jap.15.2.125

*Corresponding Author: Junus, D., E-mail: diksonjunus@unigo.ac.id

Licensed under CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/